



Media: Joglo Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 29 November 2024

Halaman: 1

UPAH Keputusan UMK tak Kunjung Dapat Kejelasan

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* — Hingga penghujung November ini, keputusan Upah Minum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 tak kunjung dapat kejelasan. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Masyustion Tonang mengungkapkan, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat. “Kami yang di daerah menunggu saja. Bahasanya tunggu perintah, tidak bisa masing-masing ngerjain sendiri. Hierarki dari atas,” ujarnya, kemarin (28/11).

Tonang menjelaskan, dalam perhitungan UMK ini pihaknya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Apindo, serikat pekerja, akademisi, hingga pemerintah. Selanjutnya berbagai elemen lembaga itu akan digabungkan dalam Dewan Pengupahan. “Nanti mereka duduk bersama menghitung dan merumuskan. Nanti kalau sudah pasti akan kami informasikan. Yang pasti per Januari sudah ada angkanya,” terang dia.

Sementara itu, Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Irsad Ade Irawan, menyampaikan, upah murah yang diterima buruh DIY menciptakan ketimpangan. Pasalnya, upah yang diterima buruh masih jauh di bawah biaya kebutuhan hidup layak (KHL).

Pemerintah pusat dan daerah, ujarnya, harus mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada upah buruh. Hal ini perlu dilakukan untuk menekan ketimpangan pendapatan yang selama ini menjadi masalah utama dalam pemerataan kesejahteraan.

“Pekerja atau buruh pada umumnya terjebak dalam ketimpangan pendapatan karena rendahnya upah dan tingkat pendidikan. Hal itu membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya lantaran pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, defisit,” terangnya. (nik/ree)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005